



KR-Antara/Fakhri Hermansyah

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) menyapa pendukungnya di Stadion Mini Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.



KR-Franz Boedikusarnanto

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka diterima Gubernur DIY Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta.



KR-Antara/HO-TPN

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus PGI di Jakarta.

## AMIN Fokus Siapkan Lapangan Kerja

JAKARTA (KR) - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan pasangan Anies-Muhaimin siap dan fokus menyediakan lapangan kerja untuk warga di Kabupaten Bekasi.

"Hal paling dibutuhkan khususnya warga di Bekasi adalah mendapatkan pekerjaan," katanya saat kampanye akbar di Lapangan Stadion Mini Cikarang Jabar, Selasa (22/1).

Ia menjelaskan, benar banyak investasi, tetapi hal itu bersifat padat modal. Dengan begitu, tidak banyak menyerap lapangan pekerjaan. Ke depan, pasangan Anies-Muhaimin akan terus mendorong investasi, tapi berorientasi pada industri padat karya. "Supaya investasinya menambah lapangan pekerjaan," ujarnya.

Pasangan AMIN juga memberikan perhatian kepada praktik-praktik orang dalam pada rekrutmen tenaga kerja. Hal itu ternyata bukan hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga di sektor swasta.

"Sudah saatnya kita kempa-

likan sistem rekrutmen menjadi proses yang transparan, proses yang secara tata kelola benar, sehingga memberikan kesetaraan kesempatan. Jangan sampai yang mendapatkan pekerjaan, hanya orang-orang yang punya koneksi. Sementara yang berprestasi tanpa koneksi, malah tidak bisa dapat kesempatan," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Anies Baswedan membakar semangat para santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wahidin Halim Pondok Pinang Tangerang Banten. Anies dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasihnya sebab menjadi saksi peresmian pondok pesantren pimpinan dr Wahidim Halim tersebut.

"Menjadi saksi sebuah ikhtiar mulia yang akan dimulai di tempat ini, yang nantinya menumbuhkan para hafiz yang mudah-mudahan, seumur perpanjang jalan hidupnya menjadi Quran berjalan, menjadi teladan bagi semuanya," ujar Anies kepada pengurus pondok pesantren tersebut. (Ant)-d

## Sultan-Prabowo Pertemuan Tertutup

YOGYA (KR) - Paslon capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Senin (22/1) menemui Sri Sultan HB X di Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan. Prabowo dan Gibran datang sekitar pukul 11.30 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, keduanya disambut pimpinan partai di DIY, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan PSI serta para pendukung. Setelah itu Prabowo-Gibran masuk ke Gedhong Willis Kompleks Kepatihan bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X untuk melakukan pertemuan tertutup.

Dalam Pilpres 2024 ini, Gubernur DIY bersikap netral dengan menerima kunjungan silaturahmi dari pasangan capres dan cawapres. Tidak hanya itu Sultan juga mempersilakan semua paslon berkampanye di DIY, dengan tertib dan menjaga suasana agar tetap kondusif.

Sultan mengatakan, pertemu-

an bersama dengan Prabowo-Gibran membahas berbagai hal, termasuk soal pilpres. Kendati demikian pembicaraan yang dilakukan masih bersifat umum.

Prabowo membenarkan apa yang sudah disampaikan Sri Sultan HB X. Prabowo mengaku dirinya dan Gibran datang untuk silaturahmi. Selain itu, juga meminta arahan terkait pandangan-pandangan Sultan tentang berbagai masalah. Terutama mengenai masa depan dan kepemimpinan. Hal ini, karena Sultan merupakan sosok yang dituakan tidak hanya di DIY, namun juga di Indonesia.

"Kami berterima kasih dapat diterima *Ngarsa Dalem* dengan baik. Kami mohon waktu dan kami melaporkan minta izin masuk ke daerah ini. Jadi sesuai budaya, adat kita, kalau mau masuk ke suatu tempat kami datang ke yang paling tua, kami mohon izin," ujar capres yang juga Menhan ini. (Ria)-d

## Ganjar Serap Aspirasi dari Pengurus PGI

JAKARTA (KR) - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi dan menyerap aspirasi dari pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dalam pertemuan di Graha Oikoumene PGI Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Ya sebenarnya kami mau silaturahmi sudah lama sekali, tetapi beberapa kali dan beberapa event kami sering bertemu, maka secara formal baru bisa dilaksanakan hari ini (kemarin). Tadi saya hadir sarapan pagi, *ngobrol* dan masih ada waktu dialog, kita bicara soal kebangsaan," kata Ganjar.

Ganjar menyebut pertemuan dengan pengurus PGI sebagai bentuk refleksi toleransi antarumat beragama. Ia menyampaikan beberapa kondisi kepada para pengurus PGI dalam dialog itu, di antaranya mengenai daerah-daerah tertinggal dan terluar, termasuk optimalisasi pembangunan di dalamnya seperti pendidikan dan lingkungan hidup.

Para pengurus PGI menitipkan harapan kepada Ganjar su-

paya pemerataan pembangunan berjalan secara optimal. Selain itu, diperlukan konsistensi serta komitmen antara pemerintah maupun masyarakat untuk memperluas kesempatan daerah agar mampu bangkit dan berkembang.

"Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari warga terkait dengan kondisi daerah masing-masing dan mereka semua ternyata sangat peduli pada lingkungan daerahnya, pada kondisi daerahnya dan ada harapan-harapan perbaikan pulau terluar, terpencil, akses pendidikan," jelasnya.

Ganjar secara lugas akan menunjukkan komitmen tetap memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), baik dalam sektor kesehatan, pendidikan, maupun akses telekomunikasi.

Ia mengajak masyarakat agar tidak segan memberikan masukan kepada pemerintah untuk kemudian berkolaborasi dalam rangka pembangunan berkelanjutan di wilayah 3T. (Ant)-d

## SOAL PENGGANTI FIRLI BAHURI

# Presiden dan Setneg Masih Konfirmasi

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka. Proses konfirmasi yang dilakukan harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Gedung Kemsetneg, Jakarta, Senin (22/1).

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19

Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa Presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut *fit and proper test* dan ke-

putusan tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Sebelumnya, Presiden telah menekan Keputusan

Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari. (Ant/Has)-d

## TERKAIT KASUS KORUPSI SYL

# KPK Panggil 2 Pejabat Kementan

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk diperiksa. Keduanya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Edi Eko Sasmito dan Kepala Badan Penuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedy Nursyamsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/1).

Penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pegawai Kementan yakni Pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementan bernama Salam dan Pegawai Biro Umum Kementerian Pertanian Tahun 2001

bernama Karina. Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyo (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu (11/10/2023).

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2019 sampai 2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya. (Ant/Has)-d

## KPAI SARANKAN

# Anak-anak Tidak Diikutkan Kampanye

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria menyarankan agar anak-anak tidak dibawa oleh orang tua pada saat mengikuti kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Legislatif.

"Selama bentuk dan praktik demokrasi masyarakat kita dalam konteks konflik elektoral belum cukup mampu melindungi anak-anak, maka KPAI menegaskan dan menyarankan agar anak-anak tidak dibawa dalam kampanye atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan massa yang cukup besar, karena ada risiko terhadap kesehatan, keamanan, kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa anak," kata Sylvana di Jakarta, Senin (22/1).

Sylvana menjelaskan, KPAI telah melakukan pengawasan hak partisipasi anak dalam konteks Pemilu sejak 2014. Selama hampir 10 tahun peng-

awasan, KPAI mengidentifikasi ada 15 bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan anak selama Pemilu.

"Yang paling banyak itu anak dibawa dalam keramaian publik selama masa kampanye. Ini memang fenomena yang cukup sulit untuk dicegah dan ditangani di lapangan, tetapi memang kita harus melakukan pencegahan agar orangtua tidak selalu membawa anak-anak dalam event kampanye," ujar dia.

Ia juga mengemukakan, persoalan sebenarnya ada pada sulitnya orang-orang dewasa memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak selama mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye. "Tadi pagi dalam dialog KPAI dan Kabareskrim Polri, kami memang menegaskan lagi, kerumunan kita itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi, bisa ribuan orang kalau dalam rapat-rapat umum, itu situasi yang berisiko untuk anak, dan bisa macam-macam akibatnya, un-

tuk kesehatan, keamanan, dan kenyamanan anak," tuturnya.

Sylvana menjelaskan, aduan lain yang cukup banyak dilaporkan ke KPAI selama masa kampanye Pemilu 2024 yakni anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu. "Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg, maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye, jadi kampanyenya ditargetkan kepada orangtua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," paparnya.

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI yakni anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh pala calon legislatif untuk melakukan kampanye. KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu. (Ant/San)-d

## ARI DWIPAYANA KONFIRMASI SEKJEN PDIP

# Tak Ada Permintaan Bertemu Megawati

JAKARTA (KR) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak benar ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya diberitakan belakangan ini. Ketidakbenaran hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu (Megawati) apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1).

Ari mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga telah mengkonfirmasi ketidakbenaran narasi tersebut. "Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI

Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan," ujarnya.

Ari mengatakan, pada dasarnya pertemuan tokoh bangsa yang juga untuk kepentingan bangsa, merupakan hal yang sangat baik. Mengingat dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa yang besar. Hal tersebut menurutnya sudah dilakukan Presiden Widodo selama ini.

"Itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan Bapak Presiden. Beliau bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, bertemu sama ulama. Dan tidak hanya tokoh-tokoh nasional, beliau ketemu tokoh daerah, yang terutama beliau bertemu adalah dengan tokoh masyarakat. Nah itu saya kira sesuatu yang sangat baik," ucap Ari.

Namun, tidak benar ada permintaan dari Jokowi untuk bertemu Megawati, seperti yang diberitakan sejumlah me-

dia belakangan ini. "Jadi saya tidak tahu hal yang seperti ini ya. Aneh juga narasi yang dikembangkan oleh sebuah media yang seolah-olah mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada permintaan bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan," tuturnya.

Mengenai adanya usulan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar Presiden didampingi sejumlah menteri yang belakangan diisukan akan mundur, apabila berniat untuk bertemu Megawati, Ari mengatakan bahwa pertemuan tokoh sangat baik. "Kalau Presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa. Dan saya kira juga Ibu Mega juga sama ya, terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa," jelasnya. (Ant/Has)-d